

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 5
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 2 September 2024
Waktu : 14.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan 2025; dan
2. Usulan program-program yang akan didanai oleh
DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.
Ketua Rapat : Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi
IV DPR RI/F-PKB) didampingi oleh Sudin, S.E. (Ketua
Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 27 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris
Jenderal);
2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal);
3. Dr. Hanif Faishol, S.Hut., MP. (Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);
4. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut.,
M.Agr.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem);
5. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Rehabilitasi Hutan);
6. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan);

7. Rosa Vivien Ratnawati, SH., MSD. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun);
8. Dr. Ir. Laksmi Dhewanthi, MA, (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
9. Dr. Ir. Mahfudz, MP. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
10. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Drs. Ade Palguna Ruteka (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM);
12. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove); dan
14. Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si. (Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dihadiri oleh Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, membahas RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2025 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dibuka pukul 14.30 WIB oleh Ketua Rapat, Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-612/MK.02/2024 dan Nomor B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025, sebesar Rp6.238.291.482.000,00 (enam triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp450.933.473.000,00 (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp70.413.220.000,00 (tujuh puluh miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, sebesar Rp287.919.073.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, sebesar Rp922.252.734.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.561.869.848.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tata Lingkungan**, sebesar Rp806.268.825.000,00 (delapan ratus enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- g. **Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp286.221.171.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- h. **Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM**, sebesar Rp324.818.127.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan belas juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- i. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp271.368.873.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp282.057.964.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp459.346.953.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- l. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, sebesar Rp169.603.604.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga juta enam ratus empat ribu rupiah);
- m. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp195.812.808.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah); dan
- n. **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, sebesar Rp149.404.809.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar empat ratus empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).

Hasil pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat ini akan dibahas dan diputuskan dalam rapat kerja, selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

2. Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2025, untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan serta program kerja yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
3. Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya percepatan realisasi program berbasis masyarakat tahun 2024 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

Komisi IV DPR RI
Ketua,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151